

BAB IV

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Subyek Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran penelitian yaitu Bank-Bank Pembangunan Daerah yang terpilih berdasarkan kriteria total asset. Bank bank tersebut adalah PT. Bank DKI, PT. BPD Jawa Barat Dan Banten, PT. BPD Jawa Tengah dan PT. BPD Jawa Timur. Berikut gambaran subyek penelitian dari bank-bank tersebut :

4.1.1 PT. Bank DKI

Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bank DKI) didirikan berdasarkan akte No. 30 tanggal 30 April 1961 yang dibuat di hadapan Eliza Pondang, berbentuk perseroan terbatas, PT Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya. Landasan Hukum Pendirian Bank DKI adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955 tentang Pengawasan Lembaga Perkreditan dan ijin usaha dari Menteri Keuangan No. BUN 9-2-42 tanggal 11 April 1961.

Modal Dasar pada saat didirikan sebesar Rp 2.500.000,00 yang terdiri dari 250 lembar saham. Pemegang saham pada waktu itu adalah Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebanyak 200 lembar saham dan 50 lembar saham dimiliki oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Poetra 1912, dengan jumlah modal disetor sebesar Rp 2.500.000,00.

Untuk menyesuaikan ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan sebagai

pelaksanaan Undang-Undang tersebut, maka diterbitkan Peraturan Daerah No.6 tahun 1978 tentang Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta. Dalam Peraturan Daerah tersebut modal dasar Bank DKI sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berupa kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, dengan jumlah modal disetor sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Untuk menyesuaikan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta dengan modal dasar sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam transaksi luar negeri, maka berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia Nomor 25/67/KEP/DIR tanggal 30 November 1992, Bank DKI resmi menjadi Bank Devisa.

Sejalan dengan langkah kebijaksanaan Pemerintah RI untuk menyetatkan sistem perbankan nasional, maka usaha dalam rangka keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah dalam Program Rekapitalisasi Perbankan, Bank DKI merubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 1999 dan Akte Pendirian Nomor 4 Tahun 1999 yang dibuat oleh Notaris Harun Kamil, SH. Dalam hal ini Modal dasar PT. Bank DKI ditingkatkan menjadi Rp 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar rupiah).

Dengan berubahnya status hokum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), maka berdasarkan Surat Keputusan Bersama

Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No.135/KMK.017/1999 dan No.32/1/KEP/GBI, PT. Bank DKI mengikuti Program Rekapitalisasi dengan melakukan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah RI, Bank Indonesia dan PT. Bank DKI pada tanggal 7 Mei 1999. Dengan demikian maka modal disetor PT. Bank DKI semakin bertambah, dimana posisi Modal Disetor sampai dengan September 1999 adalah sebesar Rp 437.100.000.000,00 (empatratustigapuluhtujuh milyar seratus juta rupiah).

PT. Bank DKI didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Adapun visi dan misi PT. Bank DKI adalah :

1. Visi : "Menjadi Bank Terbaik Yang Membanggakan"
2. Misi : "Bank berkinerja unggul, mitra strategis dunia usaha, masyarakat dan andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberi nilai tambah bagi *stakeholder* melalui pelayanan terpadu dan profesional."

Berikut adalah gambaran singkat tentang kinerja keuangan PT. Bank DKI yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian ini. Pada semester satu tahun 2011, kredit yang diberikan sebesar Rp 8.539.762 juta, total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp 14.220.796 juta, surat berharga yang dimiliki sebesar Rp 1.031.063 juta, aktiva produktif bermasalah sebesar Rp 355.255 juta, total aktiva produktif sebesar Rp 14.642.075 juta, kredit bermasalah sebesar Rp 355.255 juta, PPAP yang telah dibentuk sebesar Rp 137.377 juta, PPAP yang wajib dibentuk sebesar Rp 197.603 juta, total ISA sebesar Rp

12.126.446 juta, total ISL Rp 15.609.830 juta.

4.1.2 PT. BPD Jawa Barat Dan Banten

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat adalah Bank milik Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat bersama-sama dengan Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang didirikan berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 dengan modal dasar pertama kali ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 dan terakhir berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 1996 sebesar Rp 250.000.000.000,00.

Sejak tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 1995 mempunyai call name (sebutan) “Bank Jabar” dengan logo baru.

Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan akta pendirian nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan akta perbaikan nomor 8 tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 16 April 1999. Adapun visi misi PT. BPD Jawa Barat Dan Banten adalah:

1. Visi : “Menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia”
2. Misi :
 - a. Penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah
 - b. Melaksanakan penyimpanan uang daerah

c. Salah satu sumber pendapatan asli daerah

Berikut adalah gambaran singkat tentang kinerja keuangan PT. BPD Jawa Barat Dan Banten yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian ini. Pada semester satu tahun 2011, kredit yang diberikan sebesar Rp 25.047.876 juta, total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp 34.861.295 juta, surat berharga yang dimiliki sebesar Rp 5.744.589 juta, aktiva produktif bermasalah sebesar Rp 604.286 juta, total aktiva produktif sebesar Rp 35.816.426 juta, kredit bermasalah sebesar Rp 604.286 juta, PPAP yang telah dibentuk sebesar Rp 703.728 juta, PPAP yang wajib dibentuk sebesar Rp 788.683 juta, total ISA sebesar Rp 33.258.840 juta, total ISL Rp 42.012.735 juta.

4.1.3 PT. BPD Jawa Tengah

Dilandasi UU nomor 13 tanggal 16 Agustus 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Gubernur KDH Tk I Jawa Tengah No 005/UPUPD/62 tanggal 2 Nopember 1962, dibentuk Tim Persiapan Pendirian BPD Jawa Tengah.

Landasan hukum usaha adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah no 6 tahun 1963 tanggl 7 Maret 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, yang kemudian di undangkan dalam Lembaran Daerah Dati I Jawa Tengah seri A tahun 1963 nomor 9 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Landasan Operasional adalah Surat Persetujuan Menteri Pemerintahan Umum & Otonomi Daerah no DU57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dengan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank sen tral No4/kep/MUB/6/63 tanggal 14 Maret 1963.

Modal Dasar Bank ditetapkan sebesar Rp 100.000.000,- (UL) dan telah disetor pada tanggal 4 April 1963 sebesar Rp 20.000.000,- (UL). Dengan telah dipenuhi persyaratan pendirian Bank , maka pada tanggal 6 April 1963 diresmikan operasional Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah , Didasari pada maksud dan tujuan pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam rangka menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka mendukung pembangunan nasional, serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan maka diadakan penyempurnaan peraturan pendirian melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969 , tanggal 27 Maret 1969 serta diundangkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah tanggal 1 September 1969 No 4 Seri A. Mendasarkan hal tersebut maka Bank Pembangunan Daerah merupakan Bank milik Pemerintah Daerah (BUMD) serta sekaligus berperan sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.

Dengan tahapan perkembangan yang telah dicapai, maka diadakan perubahan peraturan pendirian kembali melalui Peraturan Daerah Jawa Tengah No.10 Tanggal 16 April 1981 dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri no 584-341.33.562 tanggal 10 Agustus 1981 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Tengah No.80 tanggal 19 September 1981 Seri D No.76. Peningkatan Status Usaha Bank menjadi Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 25/34/KEP/DIR tanggal 1 Juli 1992, dengan telah diterbitkannya surat keputusan tersebut maka Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah telah resmi beroperasi sebagai Bank Devisa.

Suatu moment penting bagi lembaga perbankan nasional adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, maka undang -undang yang mengatuir pendirian Bank -bank Pemerintah dan Undang Undang No. 13 Tahun 1962 yang mengatur pendirian Bank BPD dinyatakan tetap berlaku dengan jangka waktu selama-lamanya 1 tahun terhitung sejak tanggal 25 Maret 1992 ; didasarkan hal tersebut maka seluruh Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah wajib menyesuaikan kembali dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992.

Sejalan dengan hal tersebut , maka melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Maret 1993, maka Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah telah menyesuaikan bentuk Hukumnya menjadi Perusahaan Daerah (Perusda).

Dalam rangka pelaksanaan Program Penyehatan Perbankan Nasioanal melalui Program Rekapitalisasi Perbankan , maka Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah termasuk salah satu Bank yang ikut dalam Program Rekapitaisasi tersebut.

Dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan Program Rekapitalisasi, maka melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 dan Akte pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah

memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2.8223.HT.01.01. tahun 1999 tanggal 5 Mei 1999, bentuk badan hukum Bank BPD Jateng berubah dari Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Adapun visi dan misi PT. BPD Jawa Tengah adalah:

1. Visi : “Bank Terpercaya, menjadi kebanggaan masyarakat, mampu menunjang pembangunan daerah”
2. Misi : “Meningkatkan layanan prima didukung oleh kehandalan SDM dengan teknologi modern serta jaringan yang luas. Membangun budaya perusahaan dan mempertahankan bank yang sehat. Mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking. Meningkatkan kontribusi dan komitmen pemilik guna memperkokoh bank.”

Berikut adalah gambaran singkat tentang kinerja keuangan PT. BPD Jawa Tengah yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian ini. Pada semester satu tahun 2011, kredit yang diberikan sebesar Rp 11.416.212 juta, total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp 18.729.230 juta, surat berharga yang dimiliki sebesar Rp 5.801.300 juta, aktiva produktif bermasalah sebesar Rp 138.998 juta, total aktiva produktif sebesar Rp 16.631.925 juta, kredit bermasalah sebesar Rp 138.998 juta, PPAP yang telah dibentuk sebesar Rp 264.258 juta, PPAP yang wajib dibentuk sebesar Rp 291.799 juta, total ISA sebesar Rp 15.931.512 juta, total ISL Rp 19.341.505 juta.

4.1.4 PT. BPD Jawa Timur

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961

dengan akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1976. Atas dasar Peraturan Daerah tersebut, nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dirubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Pengesahan Peraturan Daerah tersebut oleh Menteri Dalam Negeri ditegaskan dalam Surat Keputusan Nomor Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diundangkan dalam lembaran daerah seri C Nomor 1/C tanggal 1 Februari 1977, Perda tersebut mengalami beberapa perubahan, dan untuk yang terakhir kali dirubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 1996 tanggal 30 Desember 1996 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 584.35-335 tanggal 16 Maret 1987, dan Perda Nomor 11/1996 tersebut belum diundangkan dalam lembaran daerah.

Tugas pokok Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adalah mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan membantu membiayai usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan II maupun usaha-usaha swasta yang dapat menunjang peningkatan taraf hidup rakyat serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Gubernur KDH Tk.I Propinsi Jawa Timur.

Kegiatan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meliputi kegiatan

pengelolaan dana, perkreditan, dan Pemegang Kas Daerah. Adapun visi dan misi PT. BPD Jawa Timur adalah :

1. Visi :

- a. Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar
- b. Memiliki manajemen dan sumber daya yang profesional

2. Misi :

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah
- b. Memperoleh laba optimal

Berikut adalah gambaran singkat tentang kinerja keuangan PT. BPD Jawa Timur yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian ini. Pada semester satu tahun 2011, kredit yang diberikan sebesar Rp 14.879.703 juta, total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp 20.743.580 juta, surat berharga yang dimiliki sebesar Rp 1.078.795 juta, aktiva produktif bermasalah sebesar Rp 131.671 juta, total aktiva produktif sebesar Rp 25.184.957 juta, kredit bermasalah sebesar Rp 131.671 juta, PPAP yang telah dibentuk sebesar Rp 230.692 juta, PPAP yang wajib dibentuk sebesar Rp 302.164 juta, total ISA sebesar Rp 20.142.707 juta, total ISL Rp 21.026.879 juta.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Deskriptif

Pada analisis data ini dilakukan analisis terhadap variabel-variabel secara rata-rata pada masing-masing bank. Penelitian yang akan dilakukan yaitu secara deskriptif dan secara statistik yang menguji hipotesis yang dilakukan.

1. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Posisi *Loan to Deposit Ratio (LDR)* pada keempat bank yang menjadi subyek penelitian ditunjukkan dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
POSISI LDR (%)

Periode		LDR				Rata-Rata
Tahun	Semester	Bank DKI	BPD Jawa Barat & Banten	BPD Jawa Tengah	BPD Jawa Timur	
2006	1	41,78%	71,35%	57,69%	35,63%	42,70%
	2	52,44%	75,69%	58,99%	38,77%	46,78%
2007	1	53,95%	70,70%	60,71%	37,73%	46,34%
	2	68,60%	79,15%	77,14%	42,11%	56,22%
2008	1	72,11%	76,19%	85,69%	42,44%	58,50%
	2	66,86%	89,39%	102,12%	54,02%	64,59%
2009	1	57,24%	79,02%	79,76%	51,64%	54,00%
	2	57,18%	82,02%	89,18%	69,62%	57,09%
2010	1	52,21%	63,73%	59,41%	70,40%	43,84%
	2	69,69%	71,08%	74,64%	72,15%	53,85%
2011	1	60,05%	71,85%	60,95%	71,73%	48,21%
Rata-Rata		59,28%	75,47%	73,30%	53,29%	52,01%

Sumber : lampiran 1, data diolah

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, secara rata-rata selama periode penelitian yang dimulai dari semester 1 tahun 2006 sampai dengan semester 1 tahun 2011, dapat dilihat bahwa BPD Jawa Barat Dan Banten memiliki rata-rata *Loan to Deposit Ratio (LDR)* tertinggi yaitu sebesar 75,47 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kredit lebih besar daripada peningkatan dana pihak ketiganya, sehingga BPD Jawa Barat Dan Banten memiliki kemampuan likuiditas dengan mengandalkan kredit yang relatif lebih tinggi dibandingkan sampel bank lainnya.

Sedangkan bank yang memiliki rata-rata *Loan to Deposit Ratio (LDR)* terendah adalah BPD Jawa Timur yaitu sebesar 53,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kredit lebih besar daripada penurunan dana pihak

ketiganya, sehingga BPD Jawa Timur memiliki kemampuan likuiditas dengan mengandalkan kredit relatif lebih rendah dibandingkan sampel bank lainnya.

Berdasarkan SEBI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dapat diketahui bahwa Bank DKI, BPD Jawa Tengah, dan BPD Jawa Timur termasuk dalam peringkat 1, dengan nilai 59,28 persen, 73,30 persen, dan 53,29 persen. Ketiga bank tersebut memiliki kriteria yang sangat sehat, dengan rasio antara 50 persen sampai dengan 75 persen. Sedangkan BPD Jawa Barat Dan Banten termasuk dalam peringkat 2, dengan nilai 75,47 persen. Hal ini menunjukkan bahwa BPD Jawa Barat Dan Banten memiliki kriteria yang sehat, dengan rasio antara 75 persen sampai dengan 85 persen.

2. *Investing Policy Ratio (IPR)*

Berdasarkan Tabel 4.2, secara rata-rata selama periode penelitian yang dimulai dari semester 1 tahun 2006 sampai dengan semester 1 tahun 2011, dapat dilihat bahwa BPD Jawa Tengah memiliki rata-rata *Investing Policy Ratio (IPR)* tertinggi yaitu sebesar 73,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan surat berharga lebih besar daripada peningkatan dana pihak ketiganya, hal ini juga menunjukkan bahwa BPD Jawa Tengah dalam menyalurkan dananya pada kepemilikan surat berharga sangat besar dibandingkan dengan keempat bank lainnya sehingga BPD Jawa Barat Dan Banten memiliki kemampuan likuiditas dengan mengandalkan surat berharga relatif lebih tinggi dibandingkan sampel bank lainnya. Sedangkan bank yang memiliki rata-rata *Investing Policy Ratio (IPR)* terendah adalah BPD Jawa Barat Dan Banten yaitu

sebesar 17,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan surat berharga lebih besar daripada penurunan dana pihak ketiganya, hal ini juga menunjukkan bahwa BPD Jawa Barat Dan Banten dalam menyalurkan dananya pada kepemilikan surat berharga lebih kecil dibandingkan dengan keempat bank lainnya, sehingga BPD Jawa Barat Dan Banten memiliki kemampuan likuiditas dengan mengandalkan surat berharga relatif lebih rendah dibandingkan sampel bank lainnya.

Posisi *Investing Policy Ratio* (IPR) pada keempat bank yang menjadi subyek penelitian ditunjukkan dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
POSISI IPR (%)

Periode		IPR				Rata-Rata
Tahun	Semester	Bank DKI	BPD Jawa Barat & Banten	BPD Jawa Tengah	BPD Jawa Timur	
2006	1	58,84%	23,58%	57,69%	53,88%	35,03%
	2	72,77%	31,79%	58,99%	38,17%	40,89%
2007	1	77,66%	14,82%	60,71%	35,62%	38,30%
	2	48,28%	17,68%	77,14%	31,17%	35,77%
2008	1	65,48%	20,43%	85,69%	45,33%	42,90%
	2	51,80%	15,75%	102,12%	29,89%	42,42%
2009	1	41,70%	11,65%	79,76%	35,42%	33,28%
	2	37,81%	11,02%	89,18%	13,08%	34,50%
2010	1	31,04%	16,40%	59,41%	17,44%	26,71%
	2	6,84%	7,73%	74,64%	3,23%	22,30%
2011	1	7,25%	16,48%	60,95%	5,20%	21,17%
Rata-Rata		45,41%	17,03%	73,30%	28,04%	33,93%

Sumber : lampiran 2, data diolah

3. Aktiva Produktif Bermasalah (APB)

Berdasarkan Tabel 4.3, secara rata-rata selama periode penelitian yang dimulai dari semester 1 tahun 2006 sampai dengan semester 1 tahun 2011, dapat dilihat bahwa Bank DKI memiliki rata-rata Aktiva Produktif Bermasalah (APB) tertinggi yaitu sebesar 2,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa

peningkatan aktiva produktif bermasalah lebih besar daripada peningkatan aktiva produktifnya, hal ini juga menunjukkan bahwa Bank DKI memiliki kemampuan mengelola aktiva produktif paling rendah dibandingkan keempat bank lainnya.

Sedangkan bank yang memiliki rata-rata Aktiva Produktif Bermasalah (APB) terendah adalah BPD Jawa Tengah yaitu sebesar 0,38 persen. Hal ini menunjukkan bahwa BPD Jawa Tengah memiliki kemampuan mengelola aktiva produktif yang tinggi dibandingkan dengan bank lainnya.

Posisi Aktiva Produktif Bermasalah (APB) pada keempat bank yang menjadi subyek penelitian ditunjukkan dalam Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
POSISI APB (%)

Periode		APB				Rata-Rata
Tahun	Semester	Bank DKI	BPD Jawa Barat & Banten	BPD Jawa Tengah	BPD Jawa Timur	
2006	1	2,09%	0,40%	0,43%	0,31%	0,73%
	2	1,71%	0,25%	0,32%	0,19%	0,57%
2007	1	1,78%	0,31%	0,44%	0,25%	0,63%
	2	1,95%	0,43%	0,34%	0,34%	0,68%
2008	1	2,06%	0,47%	0,44%	0,41%	0,74%
	2	2,49%	0,51%	0,18%	0,39%	0,79%
2009	1	2,87%	0,67%	0,27%	0,51%	0,95%
	2	3,28%	0,93%	0,20%	0,66%	1,10%
2010	1	3,09%	2,71%	0,28%	0,76%	1,52%
	2	2,93%	1,45%	0,45%	0,50%	1,21%
2011	1	2,43%	1,69%	0,84%	0,52%	1,24%
Rata-Rata		2,42%	0,89%	0,38%	0,44%	0,92%

Sumber : lampiran 3, data diolah

Berdasarkan SEBI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dapat diketahui bahwa Bank DKI, BPD Jawa Barat Dan Banten, BPD Jawa Tengah, dan BPD Jawa Timur termasuk dalam peringkat 1 dan 2, dengan nilai 2,42 persen, 0,89 persen, 0,39 persen, dan 0,44 persen. Keempat bank tersebut bank tersebut memiliki perkembangan rasio

yang rendah, dengan seluruh rasio rata-rata berada di bawah 5 persen.

4. *Non Performing Loan (NPL)*

Posisi *Non Performing Loan (NPL)* pada keempat bank yang menjadi subyek penelitian ditunjukkan dalam Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
POSISI NPL (%)

Periode		NPL				Rata-Rata
Tahun	Semester	Bank DKI	BPD Jawa Barat & Banten	BPD Jawa Tengah	BPD Jawa Timur	
2006	1	5,38%	0,67%	0,72%	0,87%	1,69%
	2	4,69%	0,41%	0,55%	0,40%	1,41%
2007	1	4,46%	0,51%	0,69%	0,52%	1,41%
	2	4,15%	0,69%	0,44%	0,66%	1,32%
2008	1	3,83%	0,72%	0,53%	0,91%	1,27%
	2	4,93%	0,75%	0,22%	0,71%	1,47%
2009	1	5,76%	1,07%	0,34%	0,94%	1,79%
	2	5,77%	1,51%	0,26%	1,04%	1,88%
2010	1	4,05%	1,86%	0,40%	1,10%	1,58%
	2	3,64%	1,95%	0,53%	0,71%	1,53%
2011	1	4,16%	2,41%	1,22%	0,88%	1,95%
Rata-Rata		4,62%	1,14%	0,54%	0,79%	1,57%

Sumber : lampiran 4, data diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, secara rata-rata selama periode penelitian yang dimulai dari semester 1 tahun 2006 sampai dengan semester 1 tahun 2011, dapat dilihat bahwa Bank DKI memiliki rata-rata *Non Performing Loan (NPL)* tertinggi yaitu sebesar 4,62 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kredit yang bermasalah lebih besar daripada peningkatan kredit yang diberikan, sehingga Bank DKI memiliki tingkat kualitas penanganan kredit bermasalah yang paling rendah dibandingkan dengan bank lainnya, hal ini dapat menyebabkan risiko yang tinggi sehingga dapat menurunkan pendapatan yang akan diperoleh bank.

Sedangkan bank yang memiliki rata-rata rata *Non Performing Loan (NPL)* terendah adalah BPD Jawa Tengah yaitu sebesar 0,54 persen. Hal ini menunjukkan bahwa BPD Jawa Tengah memiliki tingkat kualitas penanganan kredit bermasalah yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank lainnya, hal ini dapat menyebabkan risiko yang rendah sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang akan diperoleh bank.

5. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Posisi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada keempat bank yang menjadi subyek penelitian ditunjukkan dalam Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5
POSISI PPAP (%)

Periode		PPAP				Rata-Rata
Tahun	Semester	Bank DKI	BPD Jawa Barat & Banten	BPD Jawa Tengah	BPD Jawa Timur	
2006	1	110,59%	112,00%	121,76%	162,79%	86,09%
	2	101,13%	102,56%	104,01%	193,75%	76,93%
2007	1	105,76%	103,92%	102,38%	175,52%	78,01%
	2	100,44%	102,19%	105,51%	124,79%	77,03%
2008	1	100,52%	106,71%	110,48%	117,64%	79,43%
	2	111,48%	108,90%	114,81%	121,70%	83,80%
2009	1	115,70%	111,35%	105,00%	115,54%	83,01%
	2	103,00%	104,38%	109,98%	101,95%	79,34%
2010	1	105,25%	103,78%	106,01%	99,95%	78,76%
	2	65,62%	100,16%	87,10%	78,20%	63,22%
2011	1	42,98%	89,23%	90,56%	76,35%	55,69%
Rata-Rata		96,59%	104,11%	105,24%	124,38%	76,48%

Sumber : lampiran 5, data diolah

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, secara rata-rata selama periode penelitian yang dimulai dari semester 1 tahun 2006 sampai dengan semester 1 tahun 2011, dapat dilihat bahwa BPD Jawa Timur memiliki rata-rata Penyisihan

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) tertinggi yaitu sebesar 124,38 persen. Hal ini menunjukkan bahwa BPD Jawa Timur telah mampu membentuk pencadangan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif bermasalah melampaui kewajibannya, sehingga risiko yang timbul semakin kecil.

Sedangkan bank yang memiliki rata-rata rata Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terendah adalah Bank DKI yaitu sebesar 96,59 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Bank DKI belum mampu membentuk pencadangan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif bermasalah sesuai kewajibannya, sehingga risiko yang akan timbul semakin besar.

Berdasarkan SEBI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dapat diketahui bahwa BPD Jawa Tengah dan BPD Jawa Timur termasuk dalam peringkat 1 dan 2, dengan nilai 105,24 persen dan 124,38 persen. BPD Jawa Tengah dan BPD Jawa Timur tersebut memiliki kriteria PPAP yang dibentuk lebih tinggi dari PPAP yang wajib dibentuk. BPD Jawa Barat Dan Banten termasuk dalam peringkat 3, dengan nilai 104,11 persen sehingga BPD Jawa Barat Dan Banten memiliki kriteria PPAP yang dibentuk relatif sama atau rasio berkisar antara 100 persen sampai dengan 105 persen. Sedangkan Bank DKI termasuk dalam peringkat 4, dengan nilai 96,59 persen, sehingga Bank DKI memiliki kriteria PPAP yang dibentuk lebih kecil dari PPAP yang wajib dibentuk.

6. *Interest Rate Risk (IRR)*

Berdasarkan Tabel 4.6, secara rata-rata selama periode penelitian yang dimulai dari semester 1 tahun 2006 sampai dengan semester 1 tahun 2011,

dapat dilihat bahwa Bank DKI memiliki rata-rata *Interest Rate Risk* (IRR) tertinggi yaitu sebesar 9,73 persen. Hal ini menunjukkan bahwa risiko yang dimiliki Bank DKI relatif kecil, karena mendekati angka 100 persen. Dimana bank dikatakan tidak memiliki risiko suku bunga apabila IRR yang dimiliki adalah 100 persen, semakin jauh dari angka 100 persen maka suatu bank akan semakin tinggi risiko suku bunganya. Angka 100 persen artinya bank akan terhindar dari perubahan suku bunga karena $RSA = RSL$, baik itu pada saat suku bunga naik ataupun suku bunga turun.

Sedangkan bank yang memiliki rata-rata rata *Interest Rate Risk* (IRR) terendah adalah BPD Jawa Timur yaitu sebesar 88,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa risiko yang dimiliki BPD Jawa Timur relatif besar, karena jauh dari angka 100 persen.

Posisi *Interest Rate Risk* (IRR) pada keempat bank yang menjadi subyek penelitian ditunjukkan dalam Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
POSISI IRR (%)

Periode		IRR				Rata-Rata
Tahun	Semester	Bank DKI	BPD Jawa Barat & Banten	BPD Jawa Tengah	BPD Jawa Timur	
2006	1	94,04%	100,17%	93,15%	92,54%	71,84%
	2	92,84%	90,49%	90,47%	75,53%	68,45%
2007	1	100,86%	95,33%	92,49%	74,00%	72,17%
	2	86,35%	90,74%	93,38%	74,94%	67,62%
2008	1	100,94%	94,18%	94,45%	87,53%	72,39%
	2	97,54%	96,98%	99,67%	90,15%	73,55%
2009	1	95,11%	89,39%	90,57%	90,07%	68,77%
	2	91,53%	91,60%	96,16%	99,43%	69,82%
2010	1	84,29%	84,53%	74,80%	100,76%	60,90%
	2	87,82%	74,49%	92,42%	90,56%	63,68%
2011	1	77,70%	79,16%	82,37%	95,79%	59,81%
Rata-Rata		91,73%	89,73%	90,90%	88,30%	68,09%

Sumber : lampiran 6, data diolah

4.2.2 Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 11.5, maka analisis statistik dapat disimpulkan sebagai berikut :

4.2.2.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menentukan arah dan besarnya pengaruh variabel-variabel bebas (X) terhadap variabel tergantung (Y). Dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda, maka akan diketahui besar pengaruh dari masing-masing variabel bebas LDR, IPR, APB, NPL, PPAP, dan IRR terhadap variabel tergantung efisiensi.

Tabel 4.7
HASIL PERHITUNGAN PERSAMAAN REGRESI

Variabel Penelitian	Koefisien Regresi
X ₁ = LDR	0,016
X ₂ = IPR	-0,286
X ₃ = APB	0,3
X ₄ = NPL	-0,441
X ₅ = PPAP	0,019
X ₆ = IRR	-0,012
R Square = 0,704	Konstanta = 0,904
Sig F = 0,00	F Hitung = 14, 689

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, lampiran 9

Berdasarkan perhitungan koefisien regresi linier berganda yang ditunjukkan pada tabel 4.7, maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 0,904 + 0,016X_1 - 0,286X_2 + 0,300X_3 - 0,441X_4 + 0,019X_5 - 0,012X_6 + e_i$$

Dari persamaan regresi linier berganda dan tabel 4.7 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. $\beta_0 = 0,904$, artinya variabel tergantung efisiensi akan memiliki nilai 0,904 persen dan variabel bebas memiliki nilai sama dengan nol.
- b. $\beta_1 = 0,016$, artinya jika tiap kali terjadi kenaikan LDR (X_1) sebesar satu persen, maka akan meningkatkan efisiensi (Y) sebesar 0,016 persen, dengan asumsi variabel lain adalah konstan, atau sebaliknya, jika tiap kali terjadi penurunan LDR (X_1) sebesar satu persen, maka akan menurunkan efisiensi sebesar 0,016 persen, dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
- c. $\beta_2 = -0,286$, artinya jika tiap kali terjadi kenaikan IPR (X_2) sebesar satu persen, maka akan menurunkan efisiensi (Y) sebesar 0,286 persen, dengan asumsi variabel lain adalah konstan, atau sebaliknya, jika tiap kali terjadi penurunan IPR (X_2) sebesar satu persen, maka akan menaikkan efisiensi sebesar 0,286 persen, dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
- d. $\beta_3 = 0,300$, artinya jika tiap kali terjadi kenaikan APB (X_3) sebesar satu persen, maka akan meningkatkan efisiensi (Y) sebesar 0,300 persen, dengan asumsi variabel lain adalah konstan, atau sebaliknya, jika tiap kali terjadi penurunan APB (X_3) sebesar satu persen, maka akan menurunkan efisiensi sebesar 0,300 persen, dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
- e. $\beta_4 = -0,441$, artinya jika tiap kali terjadi kenaikan NPL (X_4) sebesar satu persen, maka akan menurunkan efisiensi (Y) sebesar 0,441 persen, dengan asumsi variabel lain adalah konstan, atau sebaliknya, jika tiap kali terjadi penurunan NPL (X_4) sebesar satu persen, maka akan menaikkan efisiensi sebesar 0,441 persen, dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
- f. $\beta_5 = 0,019$, artinya jika tiap kali terjadi kenaikan PPAP (X_5) sebesar satu

persen, maka akan meningkatkan efisiensi (Y) sebesar 0,019 persen, dengan asumsi variabel lain adalah konstan, atau sebaliknya, jika tiap kali terjadi penurunan PPAP (X_5) sebesar satu persen, maka akan menurunkan efisiensi sebesar 0,019 persen, dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

- g. $\beta_6 = -0,012$, artinya jika tiap kali terjadi kenaikan IRR (X_6) sebesar satu persen, maka akan menurunkan efisiensi (Y) sebesar 0,012 persen, dengan asumsi variabel lain adalah konstan, atau sebaliknya, jika tiap kali terjadi penurunan IRR (X_6) sebesar satu persen, maka akan meningkatkan efisiensi sebesar 0,012 persen, dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

4.2.2.2 Uji F (Uji Serempak)

Uji F ini digunakan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh semua variabel bebas LDR, IPR, APB, NPL, PPAP, dan IPR secara bersama-sama terhadap variabel tergantung efisiensi yang akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Uji Hipotesis

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = 0$$

Artinya semua variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 , dan X_6) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel tergantung (Y).

$$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq \beta_6 \neq 0$$

Artinya semua variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tergantung (Y).

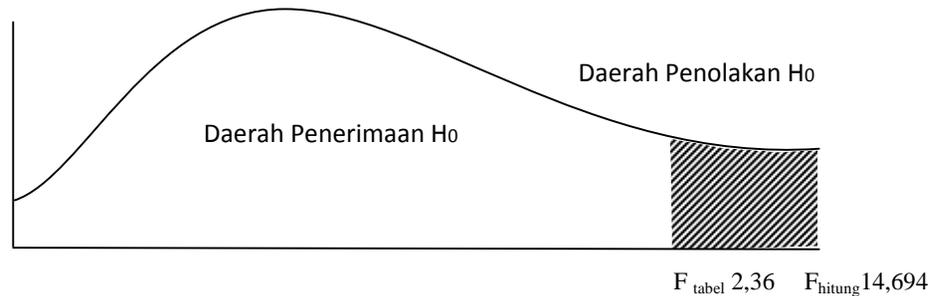
- b. $\alpha = 0,05$ dengan df pembilang = 6 dan df penyebut = $n-k-1 = 37$ sehingga

$$F_{\text{tabel}} = 2,36$$

c. kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

Jika : $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Jika : $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima



Gambar 4.1
Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Uji F

- d. Dari tabel ANOVA diperoleh signifikansi sebesar 0,000
- e. Dari tabel F dengan $\alpha = 5$ persen dengan derajat bebas pembilang 6 dan derajat bebas penyebut 37, maka diperoleh nilai $F_{tabel} = 2,36$ sedangkan $F_{hitung} = 14,694$. Dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya variabel bebas yaitu LDR, IPR, APB, NPL, PPAP, dan IPR secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tergantung efisiensi.

Kesimpulan untuk hipotesis penelitian nomer satu diterima, artinya rasio LDR, IPR, APB, NPL, PPAP, dan IPR secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pada Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa.

- f. Koefisien determinasi atau *R Square* sebesar 0,704 yang berarti perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel tergantung efisiensi (Y) sebesar 70,4

persen yang disebabkan oleh variabel bebas secara bersama-sama, sedangkan sisanya sebesar 29,6 persen disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar model atau oleh faktor pengganggu.

- g. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,839, hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel tergantung bernilai positif yaitu mendekati angka satu.

4.2.2.3 Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang meliputi LDR, IPR secara parsial mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap efisiensi, serta APB, NPL, PPAP secara parsial mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi, serta IRR secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sisi Kanan

- a. $H_0 : \beta_1 = 0$

Artinya variabel bebas (X_1) secara parsial mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap variabel tergantung (Y).

- b. $H_1 : \beta_1 > 0$

Artinya variabel bebas (X_1, X_2) secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel tergantung (Y).

2. Sisi Kiri

- a. $H_0 : \beta_2 = 0$

Artinya variabel bebas (X_2, X_3, X_4, X_5) secara parsial mempunyai pengaruh yang negatif tidak signifikan terhadap variabel tergantung (Y).

b. $H_1 : i < 0$

Artinya variabel bebas (X_2, X_3, X_4, X_5) secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel tergantung (Y)

3. Uji Dua Sisi

a. $H_0 : i = 0$

Artinya variabel bebas (X_6) secara parsial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel tergantung (Y).

b. $H_1 : i \neq 0$

Artinya variabel bebas (X_6) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tergantung (Y)

Dengan menggunakan perhitungan program spss 11.5, maka diperoleh perhitungan uji t yang terdapat tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
HASIL ANALISIS UJI t DAN KOEFISIEN DETERMINASI PARSIAL

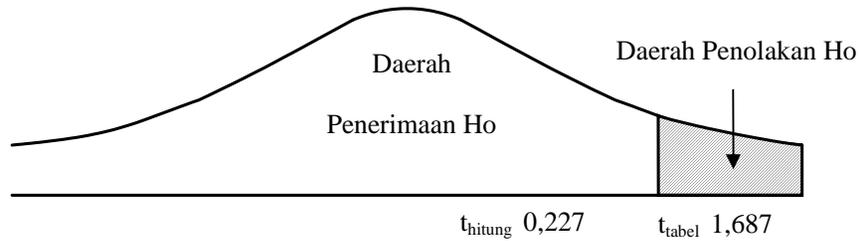
Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	R	r^2	Kesimpulan
LDR	0,277	1,687	0,037	0,0014	H_0 diterima H_1 ditolak
IPR	-4,123	1,687	-0,561	0,3147	H_0 ditolak H_1 diterima
APB	0,154	-1,687	0,025	0,0006	H_0 diterima H_1 ditolak
NPL	-0,332	-1,687	-0,054	0,0029	H_0 diterima H_1 ditolak
PPAP	0,551	-1,687	0,09	0,0081	H_0 diterima H_1 ditolak
IRR	-0,117	$\pm 2,026$	-0,019	0,0004	H_0 diterima H_1 ditolak

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, lampiran 9

A. Pengaruh LDR (X_1) Terhadap Variabel Tergantung Efisiensi (Y)

Berdasarkan uji t (tabel 4.8) variabel LDR mempunyai t_{hitung} 0,277 dan t_{tabel} 1,687 sehingga dapat diketahui bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima H_1 ditolak, artinya variabel LDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak

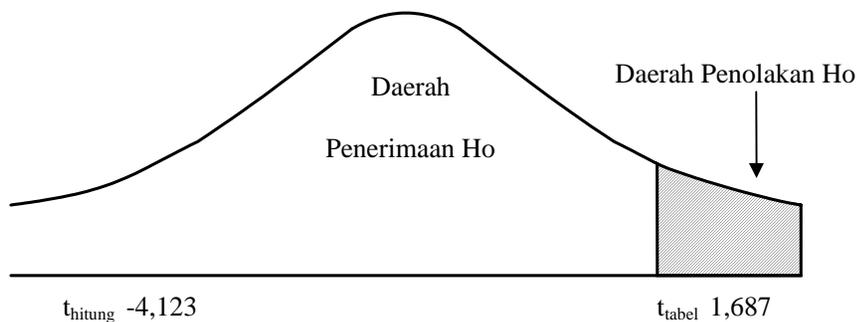
signifikan terhadap efisiensi, dengan demikian hipotesis penelitian nomor 2 ditolak atau tidak terbukti. Besarnya koefisien determinasi parsial = $0,001369 = 0,1369$ persen, artinya kontribusi LDR secara parsial terhadap efisiensi adalah $0,1369$ persen.



Gambar 4.2
Daerah Penerimaan Dan Penolakan H_0 Uji t (X_1)

B. Pengaruh IPR (X_2) Terhadap Variabel Tergantung Efisiensi (Y)

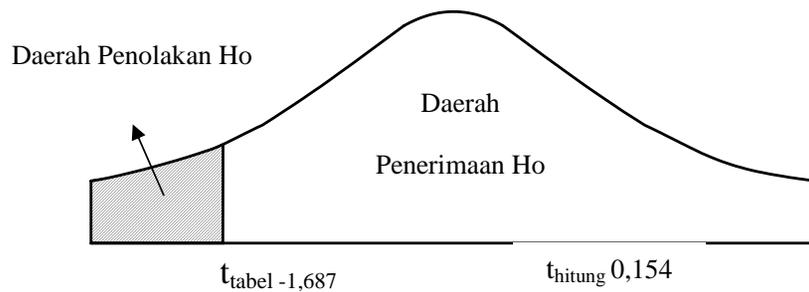
Berdasarkan uji t (tabel 4.8) variabel IPR mempunyai $t_{hitung} -4,123$ dan $t_{tabel} 1,687$ sehingga dapat diketahui bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_1 diterima, artinya variabel IPR secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap efisiensi, dengan demikian hipotesis penelitian nomor 3 diterima atau terbukti. Besarnya koefisien determinasi parsial = $0,3147 = 31,47$ persen, artinya kontribusi IPR secara parsial terhadap efisiensi adalah $31,47$ persen.



Gambar 4.3
Daerah Penerimaan Dan Penolakan H_0 Uji t (X_2)

C. Pengaruh APB (X_3) Terhadap Variabel Tergantung Efisiensi (Y)

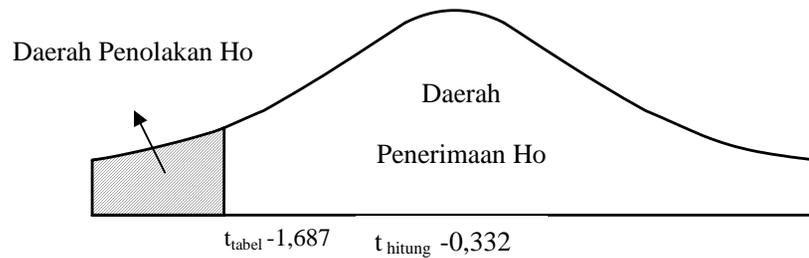
Berdasarkan uji t (tabel 4.8) variabel APB mempunyai t_{hitung} 0,154 dan t_{tabel} -1,687 sehingga dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 diterima H_1 ditolak, artinya variabel APB secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap efisiensi, dengan demikian hipotesis penelitian nomor 4 ditolak atau tidak terbukti. Besarnya koefisien determinasi parsial = 0,0006 = 0,06 persen, artinya kontribusi APB secara parsial terhadap efisiensi adalah 0,06 persen.



Gambar 4.4
Daerah Penerimaan Dan Penolakan H_0 Uji t (X_3)

D. Pengaruh NPL (X_4) Terhadap Variabel Tergantung Efisiensi (Y)

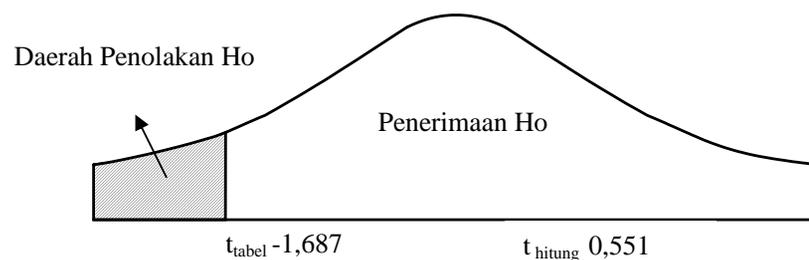
Berdasarkan uji t (tabel 4.8) variabel NPL mempunyai t_{hitung} -0,332 dan t_{tabel} -1,687 sehingga dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 diterima H_1 ditolak, artinya variabel NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap efisiensi, dengan demikian hipotesis penelitian nomor 5 ditolak atau tidak terbukti. Besarnya koefisien determinasi parsial = 0,0029 = 0,29 persen, artinya kontribusi NPL secara parsial terhadap efisiensi adalah 0,29 persen.



Gambar 4.5
Daerah Penerimaan Dan Penolakan H_0 Uji t (X_4)

E. Pengaruh PPAP (X_5) Terhadap Variabel Tergantung Efisiensi (Y)

Berdasarkan uji t (tabel 4.8) variabel PPAP mempunyai $t_{\text{hitung}} = 0,551$ dan $t_{\text{tabel}} = -1,687$ sehingga dapat diketahui bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima H_1 ditolak, artinya variabel PPAP secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap efisiensi, dengan demikian hipotesis penelitian nomor 6 ditolak atau tidak terbukti. Besarnya koefisien determinasi parsial = $0,0081 = 0,81$ persen, artinya kontribusi PPAP secara parsial terhadap efisiensi adalah 0,81 persen.

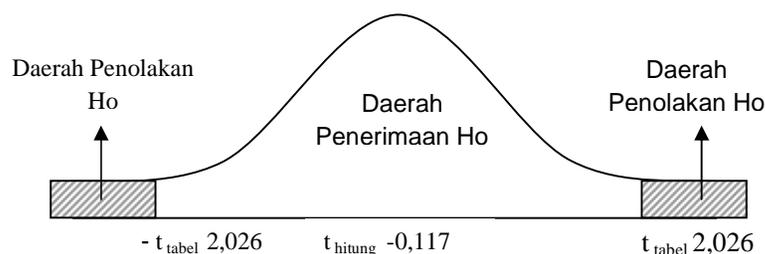


Gambar 4.6
Daerah Penerimaan Dan Penolakan H_0 Uji t (X_5)

F. Pengaruh IRR (X_6) Terhadap Variabel Tergantung Efisiensi (Y)

Berdasarkan uji t (tabel 4.8) variabel IRR mempunyai $t_{\text{hitung}} = -0,117$ dan $t_{\text{tabel}} = \pm 2,026$ sehingga dapat diketahui bahwa $-t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_0

diterima H_1 ditolak, artinya variabel IRR secara parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap efisiensi, dengan demikian hipotesis penelitian nomor 7 ditolak atau tidak terbukti. Besarnya koefisien determinasi parsial = $0,0004 = 0,04$ persen, artinya kontribusi IRR secara parsial terhadap efisiensi adalah $0,04$ persen.



Gambar 4.7
Daerah Penerimaan Dan Penolakan H_0 Uji t (X_6)

G. Pengaruh Paling Dominan Terhadap Variabel Tergantung Efisiensi (Y)

Dari besarnya kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap variabel tergantung adalah sebagai berikut :

- a. LDR dengan kontribusi sebesar $0,14$ persen
- b. IPR dengan kontribusi sebesar $31,47$ persen
- c. APB dengan kontribusi sebesar $0,06$ persen
- d. NPL dengan kontribusi sebesar $0,29$ persen
- e. PPAP dengan kontribusi sebesar $0,81$ persen
- f. IRR dengan kontribusi sebesar $0,04$ persen

Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel yang dominan pada penelitian ini adalah IPR karena memiliki kontribusi yang paling besar terhadap efisiensi yaitu sebesar $31,47$ persen.

4.2.2.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, Uji F, Uji t dengan menggunakan SPSS 11.5 maka dapat dilakukan pembahasan yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Hasil Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa diantara keempat variabel bebas yang meliputi LDR, IPR, APB, NPL, PPAP dan IRR terdapat dua variabel bebas yang koefisien regresinya tidak sesuai dengan teori, yaitu APB dan PPAP.

Hubungan dari keenam variabel bebas terhadap variabel tergantung dalam penelitian ini adalah terdapat dalam table 4.9 berikut :

Tabel 4.9
RANGKUMAN HASIL ANALISIS REGRESI

Variabel	Kesimpulan	Teori	Hasil Penelitian	Kesesuaian Teori
LDR	Ho Diterima	Positif	Positif	Sesuai
IPR	Ho Ditolak	Negatif	Negatif	Sesuai
APB	Ho Diterima	Negatif	Positif	Tidak Sesuai
NPL	Ho Diterima	Negatif	Negatif	Sesuai
PPAP	Ho Diterima	Negatif	Positif	Tidak Sesuai
IRR	Ho Diterima	Positif / Negatif	Negatif	Sesuai

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, lampiran 9

Secara rinci hubungan dari keenam variabel bebas terhadap variabel tergantung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil koefisien regresi linier berganda positif yaitu sebesar 0,016 yang berarti LDR memiliki

hubungan yang searah dengan efisiensi, dimana hasil tren menunjukkan bahwa efisiensi mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori bahwa LDR memiliki hubungan yang searah dengan efisiensi. Adapun kesesuaian penelitian ini adalah semakin tinggi LDR menunjukkan bahwa terjadi kenaikan total kredit yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan total dana pihak ketiga. Karena terjadi peningkatan kredit yang diberikan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga dan biaya operasional lain maka hubungan dengan efisiensi adalah positif. Besarnya pengaruh LDR terhadap efisiensi adalah 0,14 persen. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa LDR secara individu mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap efisiensi pada Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa ditolak atau tidak terbukti.

Hasil penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rachmah Mayadah (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, ternyata hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya hubungan negatif antara LDR dengan BOPO. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Unik Maretha Permata Sari (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, ternyata hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya hubungan positif antara LDR dengan BOPO.

B. *Investing Policy Ratio (IPR)*

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil

koefisien regresi linier berganda negatif yaitu sebesar $-0,286$ yang berarti IPR memiliki hubungan yang tidak searah dengan efisiensi, dimana hasil trend menunjukkan bahwa efisiensi mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori bahwa IPR memiliki hubungan yang tidak searah dengan efisiensi.

Adapun kesesuaian penelitian ini adalah semakin tinggi IPR menunjukkan bahwa terjadi peningkatan surat berharga yang dimiliki meningkat lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah dana pihak ketiga. Dengan meningkatnya surat berharga berarti lebih banyak dana yang disalurkan dalam bentuk surat berharga dibandingkan kredit yang diberikan. Maka efisiensi akan menurun. Demikian halnya yang terjadi pada penelitian ini, dimana IPR mengalami peningkatan yang terlihat dari kenaikan surat berharga lebih besar dari peningkatan kredit yang diberikan. Apabila dikaitkan dengan efisiensi, maka bank tersebut akan mengalami penurunan efisiensi. Besarnya pengaruh IPR terhadap efisiensi adalah $31,47$ persen. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa IPR secara individu mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap efisiensi pada Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa diterima atau terbukti.

Hasil penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rachmah Mayadah (2011) dan Unik Maretha Permata Sari (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, ternyata hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya hubungan negatif antara IPR dengan BOPO.

C. Aktiva Produktif Bermasalah (APB)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil koefisien regresi linier berganda positif yaitu sebesar 0,300 yang berarti APB memiliki hubungan yang searah dengan efisiensi, dimana hasil trend menunjukkan bahwa efisiensi mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori bahwa APB memiliki hubungan yang tidak searah dengan efisiensi.

Adapun kesesuaian penelitian ini adalah semakin tinggi APB menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktiva produktif bermasalah lebih besar daripada peningkatan aktiva produktif, maka peningkatan biaya cadangan penghapusan aktiva produktif lebih besar. Dengan meningkatnya biaya cadangan aktiva produktif maka biaya operasional lain pada bank akan meningkat sehingga efisiensi bank juga akan menurun. Namun, tidak demikian halnya yang terjadi pada penelitian ini, dimana hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan efisiensi. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan aktiva produktif bermasalah sebesar 20,92 persen yang lebih besar dari pada peningkatan aktiva produktif yaitu sebesar 9,42 persen. Peningkatan aktiva produktif bermasalah yang lebih tinggi inilah yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam penelitian. Besarnya pengaruh APB terhadap efisiensi adalah 0,06 persen. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa APB secara individu mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap efisiensi pada Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa ditolak atau tidak terbukti.

Hasil penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rachmah Mayadah (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, ternyata hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya hubungan negatif antara APB dengan BOPO. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Unik Maretha Permata Sari (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, ternyata hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya hubungan positif antara APB dengan BOPO.

D. Non Performing Loan (NPL)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil koefisien regresi linier berganda negatif yaitu sebesar -0,441 yang berarti NPL memiliki hubungan yang tidak searah dengan efisiensi, dimana hasil trend menunjukkan bahwa efisiensi mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori bahwa NPL memiliki hubungan yang tidak searah dengan efisiensi.

Adapun kesesuaian penelitian ini adalah semakin tinggi NPL menunjukkan bahwa terjadi kenaikan total kredit bermasalah yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan total kredit yang diberikan yang berakibat pada kemungkinan kredit macet lebih besar, sehingga menyebabkan peningkatan biaya pencadangan yang lebih besar, maka efisiensi bank akan menurun. Besarnya pengaruh NPL terhadap efisiensi adalah 0,29 persen. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa NPL secara individu

mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap efisiensi pada Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa ditolak atau tidak terbukti.

Hasil penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rachmah Mayadah (2011) dan Unik Maretha Permata Sari (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, ternyata hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya hubungan positif antara NPL dengan BOPO.

E. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil koefisien regresi linier berganda positif yaitu sebesar 0,019 yang berarti PPAP memiliki hubungan yang searah dengan efisiensi, dimana hasil trend menunjukkan bahwa efisiensi mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori bahwa PPAP memiliki hubungan yang tidak searah dengan efisiensi.

Adapun kesesuaian penelitian ini adalah semakin tinggi PPAP berarti peningkatan pencadangan untuk menutupi risiko tidak tertagihnya kredit atau piutang meningkat lebih besar dari pada peningkatan PPAP yang wajib dibentuk. Peningkatan pencadangan untuk menutupi risiko tidak tertagihnya kredit atau piutang akan meningkatkan biaya, jadi peningkatan PPAP menurunkan efisiensi. Namun, tidak demikian halnya yang terjadi pada penelitian ini, dimana hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan efisiensi. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan PPAP yang dibentuk sebesar 12,84 persen yang lebih besar dari pada peningkatan PPAP yang

wajib dibentuk yaitu sebesar 7,32 persen. Peningkatan PPAP yang dibentuk yang lebih tinggi inilah yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam penelitian. Besarnya pengaruh PPAP terhadap efisiensi adalah 0,81 persen. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa PPAP secara individu mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap efisiensi pada Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa ditolak atau tidak terbukti.

Hasil penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rachmah Mayadah (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, ternyata hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya hubungan negatif antara PPAP dengan BOPO. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Unik Maretha Permata Sari (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, ternyata hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya hubungan positif antara PPAP dengan BOPO.

F. Interest Rate Risk (IRR)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil koefisien regresi linier berganda negatif yaitu sebesar -0,012 yang berarti IRR memiliki hubungan yang tidak searah dengan efisiensi, dimana hasil trend menunjukkan bahwa efisiensi mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan teori yang menunjukkan bahwa pada saat suku bunga menurun, dan nilai IRR lebih besar dari 100 persen, berarti penurunan IRSA > penurunan IRSL mengakibatkan peningkatan biaya bunga, sehingga efisiensi menurun.

Besarnya pengaruh IRR terhadap efisiensi adalah 0,04 persen. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa IRR secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pada Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa ditolak atau tidak terbukti.

Hasil penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rachmah Mayadah (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, ternyata hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya hubungan positif antara IRR dengan BOPO. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Unik Maretha Permata Sari (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, ternyata hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya hubungan negatif antara IRR dengan BOPO.

2. Hasil Uji F

Berdasarkan uji F yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa LDR, IPR, APB, NPL, PPAP dan IRR secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pada Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa. Adapun besarnya pengaruh signifikan LDR, IPR, APB, NPL, PPAP dan IRR secara bersama-sama terhadap efisiensi pada Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa sebesar 70,4 persen sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable-variabel lain di luar model atau oleh factor pengganggu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menduga bahwa LDR, IPR, APB, NPL, PPAP dan IRR secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi

pada Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa diterima.

Apabila hasil penelitian ini dikaitkan dengan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rachmah Mayadah (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, mengemukakan bahwa variabel LDR, IPR, APB, NPL, PPAP, IRR dan PDN secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap BOPO. Dan juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Unik Maretha Permata Sari (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, mengemukakan bahwa variabel LDR, IPR, APB, NPL, PPAP, FBIR dan IRR secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap BOPO.

3. Hasil Uji t

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa dari semua variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu LDR, IPR, APB, NPL, PPAP dan IRR ternyata terdapat satu variabel yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pada Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa yaitu IPR. Sedangkan variabel bebas yang memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap efisiensi pada Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa yaitu LDR, APB, NPL, PPAP dan IRR. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

A. LDR

LDR mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan dan memberi kontribusi sebesar 0,14 persen terhadap efisiensi pada Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa, dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis yang menyatakan bahwa LDR secara individu mempunyai pengaruh positif

yang signifikan terhadap efisiensi Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa adalah ditolak.

Apabila hasil penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Rachmah Mayadah (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, menyatakan adanya pengaruh negatif yang tidak signifikan antara LDR dengan BOPO. Dan penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Unik Maretha Permata Sari (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, menyatakan adanya pengaruh positif yang tidak signifikan antara LDR dengan BOPO.

B. IPR

IPR mempunyai pengaruh negatif yang signifikan dan memberi kontribusi sebesar 31,47 persen terhadap efisiensi pada Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa, dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis yang menyatakan bahwa IPR secara individu mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap efisiensi Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa adalah diterima.

Apabila hasil penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Rachmah Mayadah (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, menyatakan adanya pengaruh negatif yang signifikan antara IPR dengan BOPO. Dan penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Unik Maretha Permata Sari (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan

menggunakan rasio BOPO, menyatakan adanya pengaruh positif yang tidak signifikan antara IPR dengan BOPO.

C. APB

APB mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan dan memberi kontribusi sebesar 0,06 persen terhadap efisiensi pada Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa, dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis yang menyatakan bahwa APB secara individu mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap efisiensi Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa adalah ditolak.

Apabila hasil penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Rachmah Mayadah (2011) dan Unik Maretha Permata Sari (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, menyatakan adanya pengaruh positif yang tidak signifikan antara APB dengan BOPO.

D. NPL

NPL mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan dan memberi kontribusi sebesar 0,29 persen terhadap efisiensi pada Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa, dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis yang menyatakan bahwa NPL secara individu mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap efisiensi Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa adalah ditolak.

Apabila hasil penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Rachmah

Mayadah (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, menyatakan adanya pengaruh positif yang signifikan antara NPL dengan BOPO. Dan penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Unik Maretha Permata Sari (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, menyatakan adanya pengaruh positif yang tidak signifikan antara NPL dengan BOPO.

E. PPAP

PPAP mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan dan memberi kontribusi sebesar 0,81 persen terhadap efisiensi pada Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa, dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis yang menyatakan bahwa PPAP secara individu mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap efisiensi Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa adalah ditolak.

Apabila hasil penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Rachmah Mayadah (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, menyatakan adanya pengaruh positif yang signifikan antara PPAP dengan BOPO. Dan penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Unik Maretha Permata Sari (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, menyatakan adanya pengaruh positif yang signifikan antara PPAP dengan BOPO.

F. IRR

IRR mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan dan memberi

kontribusi sebesar 0,04 persen terhadap efisiensi pada Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa, dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis yang menyatakan bahwa IRR secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi Bank-Bank Pembangunan Daerah di Jawa adalah ditolak.

Apabila hasil penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Rachmah Mayadah (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, menyatakan adanya pengaruh positif yang tidak signifikan antara IRR dengan BOPO. Dan penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Unik Maretha Permata Sari (2011) yang mengukur efisiensi bank dengan menggunakan rasio BOPO, menyatakan adanya pengaruh negatif yang tidak signifikan antara IRR dengan BOPO.